



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA PURWOKERTO

DJKN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

JALAN PAHLAWAN NOMOR 876 PURWOKERTO 53143
TELEPON : (0281) 630454; FAKSIMILE : (0281) 630451; SUREL : kpnlpurwokerto@kemenkeu.go.id

*Senantiasa Melayani Anda dengan penuh PESONA
Profesionalisme, Efisien dan Efektif, Sinergi, Optimal, Nyaman dan Amanah*

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga *good governance* yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara dapat terlaksana. Untuk itu setiap tahun anggaran berakhir instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini renstra tahun 2020 s.d. tahun 2024.

Menindaklanjuti hal itu maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPKNL Purwokerto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk mengukur kinerja KPKNL Purwokerto itu sendiri selama tahun anggaran 2024 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas berdasarkan visi yang diembannya selama ini yaitu : *“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”*.

Pada tahun 2024 capaian kinerja KPKNL Purwokerto baik, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 116,91% yang terdiri dari *Stakeholder Perspective* 30%, *Customer Perspective* 20%, *Internal Process Perspective* 25% dan *Learning & Growth Perspective* 25%. Capaian tersebut merupakan kontribusi menyeluruh dari semua Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwokerto yang telah dilaksanakan oleh semua subbagian, seksi-seksi dan fungsional, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja KPKNL Purwokerto dapat tercapai dengan baik.

Laporan Kinerja ini tersusun berkat kerja keras dan ketekunan para pihak yang terlibat dalam hal penyajian data yang diperlukan dan pengolahannya, untuk itu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik. Selanjutnya agar laporan ini dapat dipakai sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja secara

bertahap dan berkesinambungan. Dengan dilandasi prinsip CARE (*Committed, Able, Responsive, and Enthusiastic*) serta dilandasi pula oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, disamping sebagai tolak ukur kegiatan saat ini dan masa yang akan datang.

Purwokerto, Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Ali Mahmud



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance* khususnya di lingkungan KPKNL Purwokerto dan sebagai laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2024. Di samping itu selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, juga akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2024, dari 11 sasaran strategis dengan 19 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik yakni sebesar 116,91% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Purwokerto yang pada tahun 2024 mendapatkan alokasi dana DIPA (belanja barang dan modal) sebesar Rp 2.542.152.000,00 dapat kami realisasikan sebesar Rp 2.458.391.132,00 atau **96,71%**.

Dengan terwujudnya sasaran-sasaran tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memenuhi visi dan misi KPKNL Purwokerto. Capaian Kinerja dari 11 Sasaran Strategis dengan 19 IKU yang dilaksanakan KPKNL Purwokerto selama tahun 2024 menurut masing-masing perspektif dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 30% dengan nilai perspective sebesar 110,60%;
2. *Customer Perspective* dengan bobot IKU 20% dengan nilai perspective sebesar 119,27%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 25% dengan nilai perspective 120%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 25% dengan nilai perspective 119,5%.

Hasil capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik namun demikian masih terdapat permasalahan atau hambatan yang menonjol pada tahun 2024 yaitu :

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;

2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
4. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
5. Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah
6. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
7. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
8. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
9. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
10. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
11. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi covid-19;
12. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

Untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah antara lain :

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, profesional dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Rapat koordinasi antara Kantor Pertanahan, Satker dan DJKN untuk mencapai kesepakatan mendasar terhadap kendala-kendala yang dihadapi
3. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Sosialisasi kepada satker terkait proses profiling calon penyewa.
6. Melakukan koordinasi dengan satker terkait penyelesaian BKPN;
7. Percepatan Penyelesaian Piutang Negara melalui *Crash Program*
8. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 122 Tahun 2023 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;

9. Melaksanakan koordinasi dengan Pemohon Lelang terkait syarat-syarat permohonan lelang yang harus dipenuhi, terutama lelang Hak Tanggungan dalam upaya pencapaian target organisasi terutama produktivitas lelang melalui permohonan sukarela khususnya lelang UMKM dari Perbankan.;
10. Melaksanakan penggalian potensi lelang sukarela;
11. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara);
12. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
13. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
15. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
16. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
17. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	1
	B. Peran Strategis
	3
	C. Sistematika Laporan
	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	6
	A. Penetapan Kinerja
	6
	B. Pengukuran Kinerja
	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	11
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama
	11
	B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
	13
	C. Realisasi Anggaran
	26
BAB IV	PENUTUP
	28

Daftar Lampiran : Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sebagai kantor pelayanan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil, Jabatan Fungsional Pelelang, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto meliputi wilayah Kabupaten :

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Banyumas | e. Cilacap |
| b. Banjarnegara | f. Purworejo |
| c. Purbalingga | g. Wonosobo |
| d. Kebumen | |

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Purwokerto pada tahun 2024 didukung oleh 40 orang pegawai dengan posisi sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Kepala Kantor | : 1 orang |
| b. Kepala Sub Bagian Umum | : 14 Pegawai |
| c. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | : 6 Pegawai |
| d. Kepala Seksi Piutang Negara | : 3 Pegawai |
| e. Kepala Seksi Hukum dan Informasi | : 6 Pegawai |
| f. Kepala Seksi Kepatuhan Internal | : 4 Pegawai |
| g. Pejabat Fungsional Pelelang | : 4 Pegawai |
| h. Pejabat Fungsional Penilai | : 2 Pegawai |
| i. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil | : 0 Pegawai |

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan (posisi tahun 2024) sebagai berikut:

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	4
2.	III	33
3.	II	3
	Total	40

Komposisi pegawai pada tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan formal terakhir sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S2	4
2.	S1/DIV	26
3.	D3	2
4.	D1	5
5.	SMA	3
6.	SMP	0
7.	SD	0
	Total	40

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Purwokerto memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Purwokerto mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam bentuk peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset di muka umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Purwokerto secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga diharapkan lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dengan keuntungan yang ditawarkan tersebut diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet maupun *disposal asset*. DJKN dalam hal ini KPKNL Purwokerto diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka metode penjualan melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui aplikasi *e-auction*. Lelang melalui *e-auction* menjadi salah satu terobosan yang dilakukan guna menjawab perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dalam melakukan penjualan barang. Salah satu keunggulan *e-auction* yakni pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung.

4. **Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara**

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, DJKN melalui KPKNL Purwokerto memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Melalui optimalisasi pengelolaan BMN berupa pemanfaatan juga dapat meningkatkan penerimaan negara berupa PNBP.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Purwokerto Tahun 2024.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

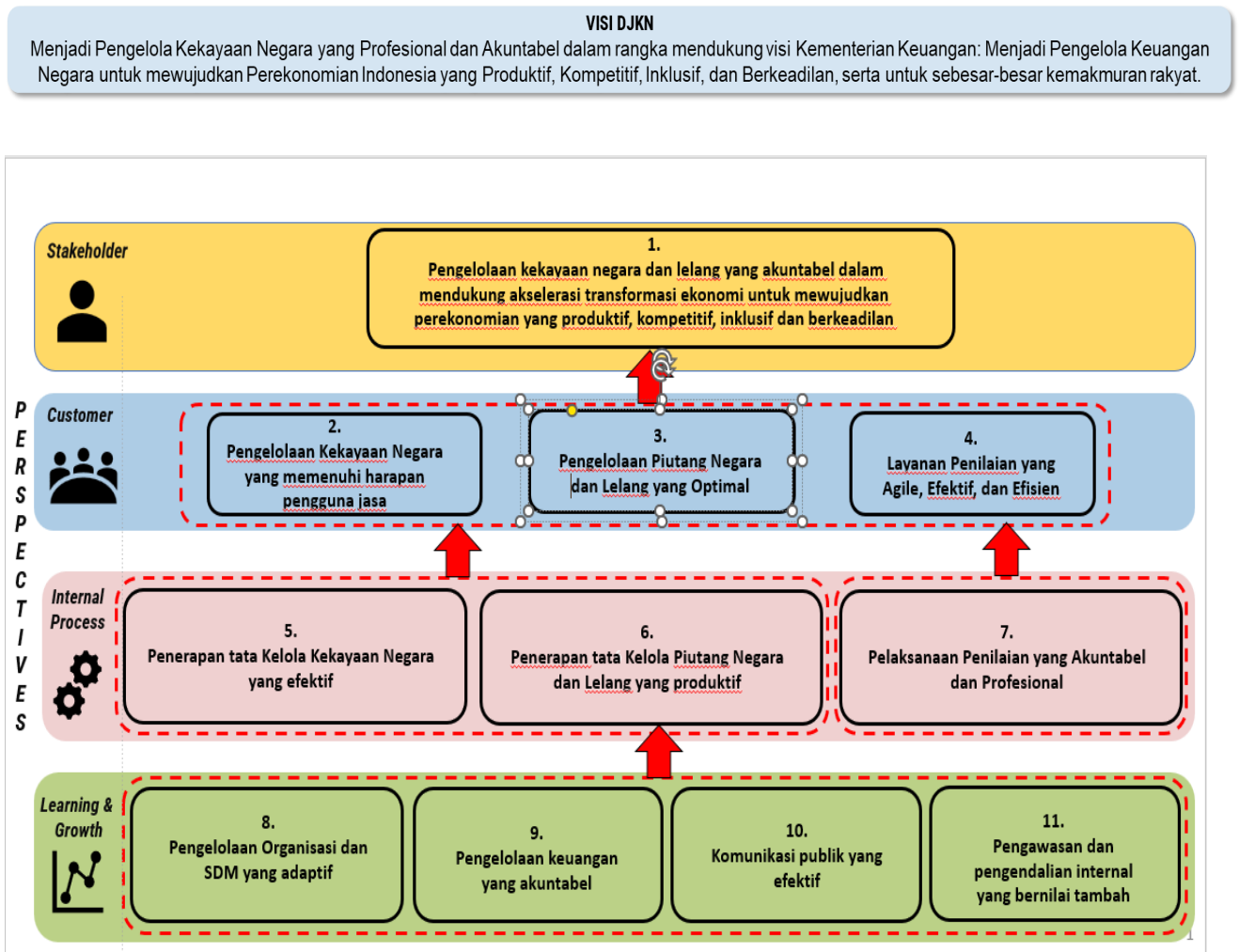
Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan, selama tahun 2024, KPKNL Purwokerto telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto di tahun yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Sesuai kontrak Kinerja antara Kepala KPKNL Purwokerto dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2024, maka KPKNL Purwokerto diberikan tugas untuk dapat mencapai target yang telah disepakati untuk tahun 2024.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Gambar 2.1 Peta Strategi DJKN

Jelas tergambar dari Peta Strategi diatas bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai 11 sasaran strategis yang terbagi dalam 4 *perspective* yang masing-masing sasaran strategis tersebut dijabarkan lagi kedalam Indikator Kinerja Utama sebagai kinerja yang harus dicapai dalam tahun bersangkutan. Peta Strategi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPKNL Purwokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, Kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.	71,5%
		2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik	86,5%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
			Negara.	
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal.	3a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	58%
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional	7a-N	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2024

B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2024, kami mengacu pada DJKN yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120 dan angka minimum adalah 0
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$ Memenuhi ekspektasi	$80 \leq X < 100$ Belum memenuhi ekspektasi	$X < 80$ Tidak memenuhi ekspektasi

3. Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
4. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2023 KPKNL Purwokerto mempunyai 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu *Three*. Rincian capaian kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2024 seperti telah disajikan pada tabel.

Capaian Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2024 disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KPKNL PURWOKERTO TAHUN 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL PURWOKERTO
PERIODE s.d. DESEMBER
TAHUN 2024

Kode	IKU	Polarisasi	W/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan									110.60	110.60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%	131.18%	14.00%	42.42%	131.18	120.00	50.91	
1b-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	89.17	92.44	19.00%	57.58%	103.67	103.67	58.69	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa									117.80	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/L	71.50%	94.37%	19.00%	50.00%	131.98	120.00	60.00	
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	MAX	P/L	86.50%	100.00%	19.00%	50.00%	115.61	115.61	57.80	
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal									120.00	119.27
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%	130.76%	14.00%	50.00%	130.76	120.00	60.00	
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	MAX	P/M	100%	138.91%	14.00%	50.00%	138.91	120.00	60.00	
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120.00	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	MAX	P/M	75	97.98	14.00%	100.00%	130.64	120.00	120.00	

Internal Process Perspective (25%)										
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif									120.00
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100%	121.56%	14.00%	50.00%	121.56	120.00	60.00
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%	132.00%	14.00%	50.00%	132.00	120.00	60.00
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif									120.00
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	58%	46.19%	14.00%	50.00%	120.36	120.00	60.00
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89%	117.84%	14.00%	50.00%	132.40	120.00	60.00
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional									120.00
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN	P/M	16%	0.00%	14.00%	100.00%	200.00	120.00	120.00
										120.00
Learning and Growth Perspective (25%)										
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif									118.00
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	90%	118.70%	14.00%	50.00%	131.89	120.00	60.00
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	MAX	P/M	85	98.61	14.00%	50.00%	116.01	116.01	58.00
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									120.00
9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	MAX	P/M	100	120	14.00%	50.00%	120.00	120.00	60.00
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	MIN	P/M	10%	0.00%	14.00%	50.00%	200.00	120.00	60.00
10	Komunikasi Publik yang Efektif									120.00
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	MAX	P/M	80	103.92	14.00%	100.00%	129.89	120.00	120.00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah									120.00
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	MAX	P/M	82	98.79	14.00%	50.00%	120.48	120.00	60.00
11b-N	Tingkat capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	MAX	P/M	100	120	14.00%	50.00%	120.00	120.00	60.00
NKO										116.91

Semua IKU dapat mencapai target dengan capaian **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 116,91%**.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang :

- Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. Desember 2024 sebesar Rp 15.374.056.325,- atau 131,18% dari target tahunan sebesar Rp 11.719.829.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi nominal PNBPK Kekayaan Negara (BMN) sebesar Rp 8.050.605.579,00 (123,03%) dari target sebesar Rp 6.543.829.000,00;
 - b. Realisasi nominal PNBPK PN sebesar Rp 141.298.606,00 (883,12%) dari target sebesar Rp16.000.000,00;
 - c. Realisasi nominal PNBPK Lelang sebesar Rp 7.182.152.140,00 (139,19%) dari target sebesar Rp 5.160.000.000,00

- ✓ Akar masalah :

Meskipun telah tercapai tetapi masih terdapat beberapa akar masalah yang menjadi perhatian yaitu :

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Potensi PNBPK semakin berkurang.
- PNBPK berupa sewa kantin/ATM di bayar di awal sewa.
- Satker Strategis bukan dalam pengelolaan KPKNL Purwokerto seperti DJKA, Tanah LP Nusakambangan, TNI.

Pelayanan Lelang :

- Banyak lelang Tidak Ada Penawaran (TAP).
- Penerimaan Bidad sebagian besar berasal dari pembayaran angsuran/pelunasan BKPN penyerahan baru dari rumah sakit (masih dalam jangka waktu 6 bulan sejak SP3N terbit) sehingga pengenaan biaya administrasi masih sebesar 1%.

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Meminta data ke KPPN Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Banjar melalui Nota Dinas.
- Koordinasi ke satker dalam rangka penggalan potensi PNBPK : MTSN Banjarnegara, RRI Purwokerto.
- Menyusun longlist BMN rusak berat.
- Koordinasi ke satker BLU.

Pelayanan Lelang :

- Penggalian potensi lelang dan sosialisasi terkait lelang.

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Koordinasi ke Kemenkumham terkait lelang BMN Rusak berat.
- Melanjutkan koordinasi ke KPPN terkait data PNBP.

Seksi Piutang Negara :

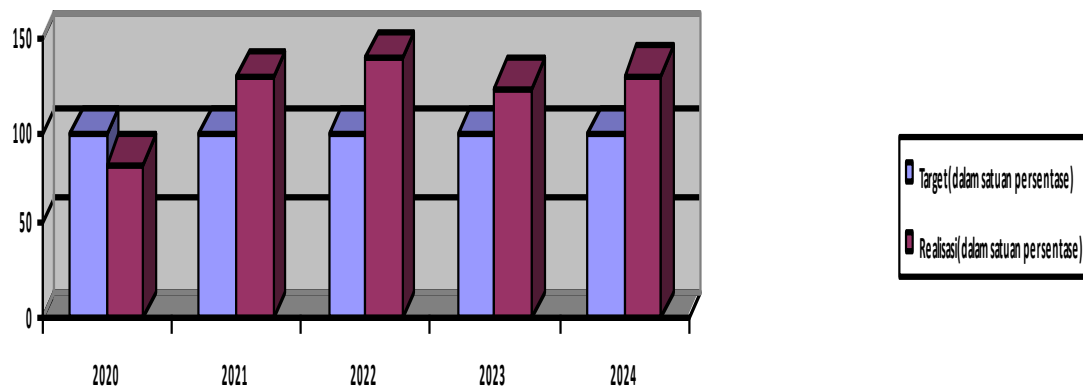
- Koordinasi dengan Pemda Kab. Kebumen dan Pemda Kab. Cilacap

Pelayanan Lelang:

- Koordinasi dan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang.

Evaluasi Capaian Persentase realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2020	2021	2022	2023	2024	Po/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	84,09%	130,05%	139,55%	124,57%	131,18%	TLK
Capaian	84,09%	120%	120%	120%	120%	



Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2018

2. IKU Indeks Integritas

Realisasi indeks integritas :

Q1 = Matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (10%)

Q2 = Matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (10%) + Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden Internal dan Eksternal ke Inspektorat Jenderal (5%) + Kegiatan Pencegahan: Sosialisasi Anti Korupsi (5%)

Q3 = Tindak Lanjut Action Plan Hasil SPI 2023 (30%).

Penghitungan:

(Total Action Plan selesai ditindaklanjuti s.d. Q3 /Total Action Plan yang harus ditindaklanjuti s.d. Q3) x 30%

Realisasi s.d. Oktober 2024 yaitu 42 sehingga capaian s.d. Q3 = 140%.

Q4 = Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%).

Realisasi Indeks Integritas sesuai nota dinas Sekretaris DJKN nomor : ND-155/KN.1/2025 tanggal 13 Januari 2025 yaitu sebesar 92,44 dengan indeks capaian tahunan sebesar 103,67%.

✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Sosialisasi antikorupsi oleh pimpinan unit kerja
- Publikasi standar pelayanan
- Publikasi nilai-nilai antikorupsi pada berbagai media
- Pembinaan oleh atasan langsung
- Pelatihan antikorupsi
- Publikasi saluran pengaduan
- Publikasi aturan disiplin dan kode etik serta perlindungan pelapor
- Pelaporan LHKPN/LHKASN
- Internalisasi hasil SPI
- Pemantauan pengendalian utama
- Peningkatkan kualitas tata kelola aplikasi layanan DJKN
- Coaching clinic penanganan benturan kepentingan
- Penajaman kembali identifikasi dan pemantauan titik rawan gratifikasi; dan
- Diseminasi "Tolak dan Laporkan Gratifikasi" pada seluruh platform komunikasi.

3. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

Penjelasan Capaian IKU :

- Realisasi SBSK dihitung berdasarkan tingkat kesesuaian tahun 2024 yaitu 96,44% dan tingkat optimalisasi tahun 2023 yaitu 87,96% Sehingga total realisasi:
- $((75\% \times 96,50\%) = 72,38\%) + ((25\% \times 87,96\%) = 21,99\%) = 94,37\%$
- Realisasi 94,32% dengan target Q4 71,5% maka capaian 131,98%.

Isu Utama :

- Beberapa asset yang menjadi target SBSK, sudah dihapus (sudah terbit SK penghapusan), namun belum dikeluarkan dari target. Harus mencari target pengganti.
- Ada beberapa asset yang sedang proses penghapusan, tidak bisa mengurangi target sbsk karena belum terbit sk hapus. Sedangkan proses penerbitan sk penghapusan di KL memakan waktu

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Penyebaran form digital ke satker.
- Asistensi ke satker Polresta Banyumas, Polresta Cilacap, Polres Purbalingga, Polres Wonosobo, Polres Banjarnegara, Pangkalan TNI AL, SPN Purwokerto.
- Menyelesaikan SBSK Optimalisasi 2023.
- Bersurat ke satker pemberitahuan rencana penghitungan SBSK dan meminta data awal.
- Koordinasi awal dengan pimpinan satker POLRI di wilayah kerja KPKNL Purwokerto.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan pengukuran lapangan.
- Koordinasi dengan pic satker untuk pengisian form.

4. Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara.

- ✓ Isu utama dan implikasi:

Penjelasan Capaian

Realisasi capaian s.d. Desember 2024 dapat dihitung sbb:

Jumlah persetujuan yang diterbitkan semester II 2023 = 55

Jumlah Persetujuan yang ditindaklanjuti oleh K/L Semester II 2023 = 55

Jumlah persetujuan yang diterbitkan semester I 2024 = 50

Jumlah persetujuan yang ditindaklanjuti oleh K/L Semester I 2024 =50

Realisasi s.d. Desember 2024 yaitu 100% dengan target Q4 86,5% maka capaian sebesar 115,61%.

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan:
 - Sosialisasi yang dilakukan oleh JF Pelelang untuk pengajuan lelang BMN dengan aturan baru PMK 122/2023.
 - Menghubungi Satker via WA, untuk menanyakan terkait tindak lanjut persetujuan.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
 - Bersurat ke Satker untuk melaporkan tindak lanjut.
 - Menghubungi pic Satker, untuk konfirmasi terkait tindak lanjut persetujuan.
 - Koordinasi dengan PL untuk RL yang sudah terbit.

5. Persentase realisasi Pokok Lelang

- ✓ Isu utama terkait realisasi Pokok Lelang:

Penjelasan Capaian :

Realisasi pokok lelang s.d. Desember 2024 sebesar Rp 212.194.016.580,- atau (130,76%) dari target tahunan atau target adendum sebesar Rp 162.280.000.000,- dengan rincian :

- Realisasi Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp 138.247.930.380,- dari target tahunan adendum Rp 107,28 Milyar, capaian sebesar 128,87%
- Realisasi Pokok Lelang pegadaian sebesar Rp 73.946.086.200,- dari target tahunan adendum Rp 55 Milyar,- capaian sebesar 134,45%
- Catatan :
Target Sebelum adendum sebesar Rp 120 M.

- ✓ Akar Masalah:
Meskipun telah tercapai tetapi masih terdapat beberapa akar masalah yang menjadi perhatian yaitu :
Banyak lelang TAP dari perbankan (lelang eksekusi Hak Tanggungan).
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan:
 - Penggalan potensi lelang laku.
 - Sosialisasi terkait lelang.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
 - Melakukan verifikasi digital secepat mungkin dan sebanyak mungkin dengan harapan semakin banyak lelang semakin banyak objek yang laku.
 - Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang.

6. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

- ✓ Isu utama dan implikasi:

Penjelasan Capaian :

Realisasi persentase penurunan nilai outstanding piutang negara s.d. Desember 2024 sebesar Rp 5,706,988,182.45 atau (138,91%.) dari target adendum Rp 4.108.500.000,-

Catatan :

Target sebelum adendum Rp 1,8 M.

- ✓ Tindakan yang Telah Dilaksanakan:

- Melakukan Penagihan langsung maupun panggilan kepada debitur.
- Melakukan koordinasi dengan BPKAD Kebumen, Purworejo dan RSUD Cilacap.
- Melaksanakan lelang LPDB-KUMKM debitur CV Sri Rahayu.

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi:

Koordinasi dengan Pemda Kab. Kebumen dan Pemda Kab. Cilacap.

7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

- ✓ Isu utama dan implikasi:

Penjelasan Capaian :

Realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian s.d. Desember 2024 sebesar 98.85 dari target 75 sehingga capaian 131.80%.

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi:

Secara berkelanjutan, beriringan dengan survei penilaian, terus memberikan edukasi, komunikasi kepada satker/pemohon.

8. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

- ✓ Isu utama dan implikasi:

Penjelasan Capaian :

Realisasi Sertipikasi s.d. Desember 2024 berdasarkan target bidang yaitu :

K1: 992/1310 K2: 38/76 K3: 1112/437 K4:74/0

Sehingga capaian persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan s.d. Desember 2024 berdasarkan target bidang tercapai 2216 bidang atau 121,56% dari target tahunan (100%) atau 1823 bidang.

- ✓ Akar Masalah:
 - Setelah Rakor dengan Kantah dan Satker, diperoleh informasi bahwa Satker DJKA tidak bisa menyelesaikan target K1 sejumlah 293NUP/1072 bidang, karena status masih K3 seperti tahun 2023.
 - Satker Kekurangan personil yang bertugas mendampingi kantah untuk plotting
 - Satker belum bisa memastikan batas-batas bidang tanah.
 - Satker belum familiar dengan aplikasi sentuh tanahku milik BPN untuk input K3.
 - K4 muncul karena ada capaian, namun tidak menjadi target.
 - Aplikasi valserah di siman v2 belum bisa digunakan, sehingga sertipikat yang sudah terbit belum bisa divalidasi untuk diakui sebagai capaian.
 - Pelaksanaan deliniasi belum disepakati antara DJKN dengan DJKA.

- ✓ Tindakan yang Telah Dilaksanakan:
 - Rakor Sertifikasi dengan Kantor Pusat dan Kementerian ATR/BPN 21-23 Februari 2024.
 - Rakor dengan Kantah dan seluruh satker di wilayah kerja KPKNL Purwokerto tgl 20 Februari 2024.
 - Bersurat ke Kanwil ATR/BPN menyampaikan BA hasil kesepakatan Rapat koordinasi.
 - Bersurat ke Satker untuk konfirmasi rencana penyelesaian target 2024.
 - Kerjasama dengan kantah untuk sosialisasi sentuh tanahku.

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi:
 - Validasi Valserah untuk data sertifikat yang sudah diinput satker.
 - Koordinasi dengan Satker di Pulau Nusakambangan terkait sertifikasi tanah.

9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

Realisasi evaluasi kinerja dan rekomendasi BMN s.d. Desember 2024 dari target 92 NUP tercapai 115 NUP atau 125%.

Realisasi Pencapaian Tindak lanjut dari target 5 Paket tercapai 6 paket atau 120%.

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian IKU} &= (80\% \times 125\%) + (20\% \times 160\%) \\ &= 132\% \end{aligned}$$

Capaian evaluasi Kinerja BMN s.d. Desember 2024 yaitu 132% berdasarkan target tahunan sebesar 100%.

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Internalisasi tata cara penghitungan evaluasi kinerja BMN.
- Menyusun longlist detail target.

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

- Melakukan evaluasi kinerja BMN ke satker.
- Menyampaikan rekomendasi evakin.
- Menghubungi pic satker untuk menjawab surat rekomendasi evakin.

10. Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

- Realisasi Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara yaitu jumlah saldo awal tahun sebanyak 394 BKPN telah menyelesaikan 212 BKPN sehingga saldo akhir s.d. Desember 2024 sebanyak 182 BKPN atau 46,19% capaian s.d. Desember 2024 dengan target 58% yaitu 120,36%.

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Melakukan Penagihan langsung maupun panggilan kepada debitur.
- Melakukan koordinasi dengan BPKAD Kebumen, Purworejo dan RSUD Cilacap.
- Melaksanakan lelang LPDB-KUMKM debitur CV Sri Rahayu.

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

- Koordinasi dengan Pemda Kab. Kebumen dan Pemda Kab. Cilacap dlm rangka penyelesaian BKPN.

11. Persentase produktivitas lelang

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

- Realisasi produktivitas lelang s.d. Desember 2024 sebesar 117,83% sehingga dengan target Tahunan 89% capaian sebesar 132,40%..

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Penggalan potensi lelang laku.

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang dengan pemohon lelang.
- Meningkatkan Permohonan Lelang Sukarela, UMKM.

12. Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

- Realisasi Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian s.d. Desember 2024 sebesar 0% dari target 16% merupakan IKU minimize sehingga capaian 120%.

13. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

- Target pengembangan kompetensi setiap pegawai = 40 Jam Pelatihan
- Jumlah pegawai target pengembangan kompetensi pegawai = 39
- Jumlah pegawai telah memenuhi target pengembangan kompetensi = 39
- Jumlah pegawai telah memenuhi & telah melebihi target pengembangan kompetensi = 39

- Capaian IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai :

$$= (39/39 + (20\% \times 39/39)) = 120\% \times 50\% = 60\%$$

Terdapat penambahan Komponen Kebintalan

- Pelaksanaan Kegiatan (80%) TW I,II,III dan (60%) TW IV
- Kepatuhan Pelaporan (20%) TW I,II,III dan (10%) TW IV
- Feedback peserta (30%) TW IV
- Capaian yaitu : $(80\% \times 120\%) + (20\% \times 110) = 118\% \times 50\% = 59\%$

Realisasi dari komponen Pengembangan Kompetensi dan Komponen Kebintalan yaitu 119% dengan target tahunan 90% maka capaian sebesar 132,22%.

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Monitoring rutin dan asistensi kepada semua pegawai target untuk memanfaatkan semua fasilitas pengembangan kompetensi (diklat/pelatihan) yang ada baik mandatory; usulan pembelajaran maupun open acces learning untuk memastikan setiap pegawai telah memenuhi minimal = 40 Jam Pelatihan.
 - SDM: permintaan tambahan pegawai untuk formasi bendahara.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Melanjutkan Monitoring rutin dan asistensi kepada semua pegawai target.

14. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

 - Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko terdiri dari 2 komponen yaitu
 - a. Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Kinerja (60%) nilai 97,68
 - Kinerja Organisasi (30%) nilai 98,73
 - Kinerja Pegawai (30%) Nilai 96,63
 - b. Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%) Nilai 100
 - Realisasi s.d. Desember 2024 yaitu $(30\% \times 98,73) + (30\% \times 96,63) + (40\% \times 100) = 98,61$ dengan target 85 sehingga capaian sebesar 116,01%.

15. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

 - Realisasi IKU IKPA s.d. Desember 2024 adalah 120 sehingga capaian dengan target 100 maka capaian 120%.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Melakukan efisiensi anggaran khususnya pada uang harian perjalanan dinas.
 - Mengoptimalkan capaian output.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik dari sisi output maupun realisasi DIPA.
 - Koordinasi dengan para pemangku kepentingan internal.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Melakukan rapat monev pelaksanaan anggaran.

16. Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN

- ✓ Isu utama dan implikasi:

Penjelasan Capaian :

Deviasi PNBP Lelang : selisih data OMSPAN >< Dropbox = 0,00%

Deviasi PNBP PN : selisih data OMSPAN >< Focus PN = 0,0%

Realisasi nilai deviasi merupakan rata-rata dari kedua deviasi tersebut s.d. Desember 2024 sebesar 0,0% atau 120%

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Pengendalian angka deviasi dengan selalu Monitoring sumber data capaian (OMSPAN, Dropbox, focus PN; rekap excel) dan melakukan cek/konfirmasi data dengan cermat.

17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

- ✓ Isu utama dan implikasi :

Penjelasan Capaian :

- Realisasi Indeks PPID s.d. Desember 2024 adalah 103,92 dengan target Q4 80 maka capaian sebesar 129,89%.

18. Indeks efektivitas UKI

- ✓ Isu utama dan implikasi:

Penjelasan Capaian :

- Q1 Penyampaian Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI (5%).
- Q2 (15%) = Penyampaian Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI (5%) + Rencana Pemantauan Tahunan (5%) + Fraud Risk Scenario (5%).
- Q3 (20%) = Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama Semester I 2024 (20%).
- Q4 = Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%).

Realisasi Indeks Efektifitas UKI sesuai nota dinas Kepala Kanwil DJKN Jawa tengah dan D.I. Yogyakarta nomor : ND-1756/WKN.09/2025 tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 98,79, dengan target 82 maka capaian sebesar 120,48%.

19. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM

Penjelasan Capaian :

Indeks Komponen I = Indeks Implementasi Keberlanjutan Program ZI (ketersediaan dokumen mulai dari minimal 1 tahun sebelumnya (Y-1) s.d Q1 tahun penilaian berlangsung (Y) antara lain sebagai berikut:

1. SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM;
2. Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM;
3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Monev Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala (Undangan, notula, daftar hadir).

Indeks Komponen II = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian (Submit) Dokumen pada Aplikasi DIA.

Indeks Komponen III = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation.

Indeks Komponen IV : Hasil Monev WBK/WBBM+Apresiasi.

Sesuai ND-4317/KN.1/2024 tanggal 22 November 2024 KPKNL Purwokerto berhasil dalam Keberlanjutan Predikat ZI WBBM tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis

✧ Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN

a. Penjelasan:

Koin mas KPKNL Purwokerto mengangkat pemanfaatan sewa cold storage pada satuan kerja Pelabuhan Perikanan Smusera cilacap. Saat ini pengelolaan masih belum menggunakan tarif pada ketentuan pnk 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN. Pada Q1 kami telah menyusun proposal dan upaya penyebarluasan informasi melalui media sosial secara massif.

Saat ini kami sedang berusaha melakukan pemasaran terhadap aset tersebut.

Kendala/Akar Masalah

Akar masalah pada project ini adalah beban yang ditanggung oleh DIPA terutama untuk biaya pemeliharaan terhadap cold storage yang menurut hemat kami merupakan properti khusus, sehingga biaya pemeliharaan rutin yang relatif tinggi.

Kegiatan

- Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan
- Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan
- Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan
- Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Output

- Q1: Daftar Asset yang Akan diberdayakan/ dimanfaatkan
- Q2: Laporan Kegiatan Monitoring
- Q3: Laporan Kegiatan Monitoring
- Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan

KPKNL Purwokerto Menjadi Juara I Pada Grand Final Koin Mas DJKN 23/24 tanggal 2 Desember 2024

b. Penjelasan

Koin mas KPKNL Purwokerto mengangkat Pemanfaatan BMN Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen Sebagai Usaha Pertanian

Tahap/Progress

Pembayaran Sewa senilai Rp.10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Juli 2024.

Penandatanganan Perjanjian sewa antara penyewa dengan Rutan Kebumen Nomor Perjanjian Sewa W13.PAS.PAS.36.PB.03.02- 1157 tanggal 4 Juli 2024.

Kegiatan

- Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan
- Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan
- Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan
- Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Output

- Q1: Daftar Asset yang Akan diberdayakan/ dimanfaatkan

- Q2: Laporan Kegiatan Monitoring
- Q3: Laporan Kegiatan Monitoring
- Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan

Rencana Aksi:
Monitoring Pemanfaatan sewa.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2024 seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA tahun 2024. Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2024 sesuai nomor SP DIPA- 015.09.2.537770/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp 2.542.152.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) Selama TA 2024 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 9 (Sembilan) kali. Selama TA 2024 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 2.458.391.132,00 atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar **96,71%**.

Adapun realisasi anggaran sebesar **96,71%** tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 554.053.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 550.709.024,00 atau sebesar **99,40%**.

2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.988.099.000.,00 dengan realisasi sebesar Rp1.907.682.108,00 atau sebesar **95,96%**. Sejak mulai tahun 2021 anggaran belanja pegawai sudah terpusat pada DIPA Eselon I bahkan pada akhir 2022 secara bertahap diahlikan pada DIP Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga unit vertikal tidak memperoleh pagu belanja pegawai.

Terdapat perbedaan persentase realisasi anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi capaian IKU, dimana berdasarkan laporan realisasi anggaran, penyerapan sebesar **96,71%** (belanja barang dan modal) sedangkan

menurut realisasi capaian IKU sebesar **120%**. Hal ini terjadi karena pada realisasi capaian IKU selain memperhitungkan penyerapan anggaran juga memperhitungkan pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi, dimana dalam memperhitungkan capaian IKU tersebut terdapat formula penghitungannya sendiri dan masing-masing realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian keluaran riil, realisasi efisiensi dan realisasi konsistensi memiliki pembobotan tersendiri dalam formula penghitungannya.

BAB IV P E N U T U P

A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2024 dengan sangat baik. Seluruh target atas 11 Sasaran Strategis dengan total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2024 dapat tercapai dengan sempurna, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 116,91% dari nilai maksimal 120%.

Salah satu prestasi KPKNL Purwokerto yang berhasil di capai pada tahun 2024 yaitu berhasil dalam Keberlanjutan Predikat ZI WBBM tahun 2024 sesuai ND-4317/KN.1/2024 tanggal 22 November 2024 KPKNL Purwokerto. Hal ini perlu agar dapat menunjukkan konsistensi KPKNL Purwokerto dalam peningkatan kinerja dan dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para *stakeholder*;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai;

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Purwokerto dapat berjalan dengan mudah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Purwokerto pada tahun 2024 ternyata masih terdapat perolehan nilai capaian indikator kinerja utama yang belum memuaskan dan juga masih adanya beberapa permasalahan yang menonjol yang merupakan hambatan pada tahun 2024. Maka dari itu, untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam komentar (ringkasan eksekutif) di atas. Dalam perjalanannya KPKNL Purwokerto menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Data PNPB BMN sering terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)
4. Proses sertifikasi terkendala dengan belum adanya BAST dari Pemprov Jateng kepada Satker PJJ II.
5. Penyerahan BKPN dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;
6. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
7. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
8. Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah;
9. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
10. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
11. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
12. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
13. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;

14. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi covid-19;
15. Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal
16. Terdapat penambahan anggaran belanja modal dipertengahan tahun yang membuat nilai IKPA OMPSAN tidak bisa maksimal
17. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Purwokerto adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Purwokerto agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Purwokerto lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang *e-auction*;

6. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 122 Tahun 2023 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara),
8. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara dan sertifikasi BMN;
17. Melaksanakan kegiatan SEMBARI “Semangat Menyambut Mentari” yaitu program sapa pagi dari Kepala KPKNL Purwokerto untuk memastikan semua pegawai dalam keadaan sehat dan *me-riveuw* agenda pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;
18. Melaksanakan program BLAKASUTA “Blak – Blakan Suka Cerita” yaitu program sharing informasi terkait tugas dan peraturan terbaru dari masing - masing Seksi dan Fungsional, sehingga seluruh pegawai dapat memahami tugas dan fungsi KPKNL Purwokerto dengan baik.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tahun anggaran 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja khususnya Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pula pada masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.



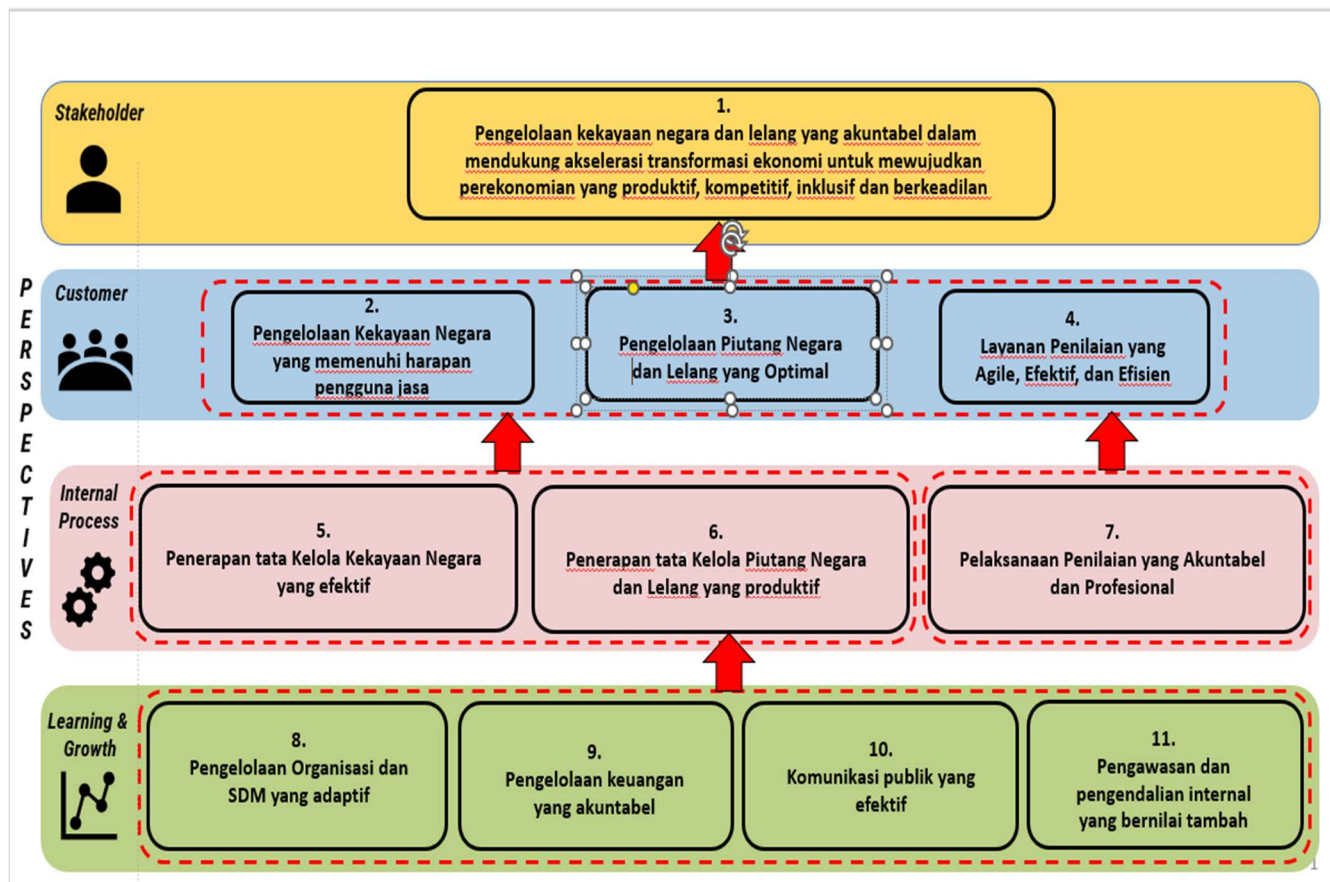
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-06/KN.21/2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
TAHUN 2024

VISI DJKN

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, Kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp 11,7M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp 120M)
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp 1,8M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
		5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	58 (229 BKPN)
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian	16

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 10.510.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp 378.002.000,00
3. Legislasi dan Litigasi	Rp 66.647.000,00
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.041.105.000,00
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 34.068.000,00
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 16.800.000,00

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani



Ditandatangani Secara Elektronik
Ali Mahmud



**RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, Kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	58	58
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Purwokerto,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ali Mahmud



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ali Mahmud	NAMA	Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	
NIP	197107111997031002	NIP	196503041991032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, Kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan	71,5	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Standar Barang dan Standar Kebutuhan		
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
		Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	Proses Bisnis
6.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	58	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89	Proses Bisnis

7.	Pelaksanaan penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	83	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ali Mahmud
NIP 197107111997031002

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
NIP 196503041991032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	43 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75

8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	58	58
12	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
13	Persentase Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ali Mahmud
NIP 197107111997031002



Ditandatangani secara elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
NIP 196503041991032001

